



Strategi Penyelesaian Konflik Dan Penguatan Tata Kelola Organisasi Masyarakat (Ormas) Di Kabupaten Bojonegoro : Studi Magang Di Bakesbangpol

Maharani Azi Sandra Z.P

maharaniazsp@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Caranoya Ramadhanti S

caranoyar@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *maharaniazsp@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the dynamics of inter-community organization (ormas) conflicts and collaborative ormas management strategies in Bojonegoro Regency. Using a qualitative approach and the author's direct participation during an internship at Bakesbangpol Bojonegoro (13 January -7 March 2025), data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and policy document analysis. The results indicate that ormas conflicts in Bojonegoro in 2025 were dominated by economic competition, such as disputes over parking areas and local infrastructure projects. Bakesbangpol acted as a mediator by implementing local wisdom-based conflict resolution models, including traditional deliberation and inclusive economic approaches. A key finding is the successful transformation of "Pemuda Mandiri" (Ormas X) and "Gerakan Bojonegoro Bersatu" (Ormas Y) from conflict groups into development partners through MSME empowerment programs. Meanwhile, "Laskar Hijau" (Ormas Z) exemplifies successful community-based environmental management. This study concludes that synergy between cultural approaches, policy transparency, and economic empowerment is key to reducing ormas conflicts.*

Keywords: *Ormas Conflict, Cultural-Based Mediation, Bakesbangpol Bojonegoro, Economic Empowerment, Ormas Governance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik antar-ormas serta strategi pengelolaan ormas berbasis kolaborasi di Kabupaten Bojonegoro. Melalui pendekatan kualitatif dan partisipasi langsung penulis selama magang di Bakesbangpol Bojonegoro (13 Januari – 7 Maret 2025), data dikumpulkan via wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ormas di Bojonegoro pada tahun 2025 didominasi oleh persaingan ekonomi, seperti perebutan lahan parkir dan proyek infrastruktur lokal. Bakesbangpol berperan sebagai mediator dengan menerapkan model resolusi konflik berbasis kearifan lokal, seperti musyawarah adat dan pendekatan ekonomi inklusif. Salah satu temuan kunci adalah keberhasilan transformasi Ormas "Pemuda Mandiri" (Ormas X) dan "Gerakan Bojonegoro Bersatu" (Ormas Y) dari kelompok konflik menjadi mitra pembangunan melalui program pemberdayaan UMKM. Adapun Ormas "Laskar Hijau" (Ormas Z) menjadi contoh sukses pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pendekatan kultural, transparansi kebijakan, dan pemberdayaan ekonomi menjadi kunci pengurangan konflik ormas.

Kata kunci: Konflik Ormas, Mediasi Berbasis Budaya, Bakesbangpol Bojonegoro, Pemberdayaan Ekonomi, Tata Kelola Ormas

LATAR BELAKANG

Organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, memiliki peran ganda: sebagai kekuatan penekan (pressure group) dan mitra pemerintah dalam

pembangunan. Namun, pada tahun 2025, dinamika ormas di Bojonegoro menghadapi tantangan kompleks, terutama eskalasi konflik horizontal yang dipicu persaingan ekonomi dan politisasi kelompok. Selama magang di Bakesbangpol Bojonegoro, penulis menyaksikan langsung tiga kasus konflik ormas yang berujung pada kerusakan fasilitas publik dan terganggunya aktivitas ekonomi di pasar tradisional.

Salah satu pemicu utama konflik adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti penguasaan lahan parkir dan proyek pemeliharaan jalan desa. Misalnya, pada Februari 2025, dua ormas berebut hak pengelolaan lahan parkir di Pasar Ngumpakdalem, yang menghasilkan pendapatan hingga Rp20 juta per hari. Konflik ini tidak hanya melibatkan anggota ormas, tetapi juga menarik perhatian massa pendukung dari luar daerah. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan distribusi sumber daya oleh pemerintah daerah.

Bakesbangpol Bojonegoro, sebagai institusi yang bertugas memelihara harmoni sosial, menghadapi dilema antara menegakkan regulasi (UU No. 17/2013 tentang Ormas) dan mempertahankan kearifan lokal dalam resolusi konflik. Selama ini, pendekatan represif seperti pembubaran ormas dianggap kurang efektif karena berpotensi memicu resistensi. Oleh karena itu, Bakesbangpol mulai mengadopsi model mediasi partisipatif yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan akademisi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk menemukan formula pengelolaan ormas yang seimbang antara penegakan hukum dan pendekatan humanis. Di sisi lain, potensi ormas sebagai agen pembangunan belum tergarap optimal. Sebagai contoh, beberapa ormas di Bojonegoro memiliki jaringan luas dan kemampuan mobilisasi massa yang bisa dialihkan untuk program pemberdayaan masyarakat.

Studi literatur mengungkap bahwa konflik ormas di Indonesia sering kali terkait dengan masalah ekonomi-politik lokal (Suryadinata, 2023). Namun, belum banyak penelitian yang membahas resolusi konflik berbasis kearifan lokal, seperti musyawarah adat atau integrasi nilai-nilai budaya Jawa dalam mediasi. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menyajikan praktik terbaik dari Bojonegoro.

Metode penelitian dirancang untuk menggali perspektif multistakeholder, termasuk anggota ormas, aparat Bakesbangpol, dan masyarakat terdampak. Partisipasi penulis dalam proses mediasi selama magang memungkinkan akses ke data primer yang otentik, seperti notulensi rapat tertutup dan dokumen kesepakatan antar-ormas.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penguatan ormas yang inklusif. Selain itu, praktik mediasi berbasis budaya di Bojonegoro berpotensi direplikasi di daerah lain dengan konteks sosio-kultural serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penulis terlibat langsung sebagai peserta magang di Bakesbangpol Bojonegoro selama enam bulan (Januari-Juni 2025), yang memungkinkan observasi partisipatif terhadap proses mediasi, rapat koordinasi, dan pendampingan ormas. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan kunci, terdiri dari ketua ormas (4 orang), staf Bakesbangpol (3 orang), tokoh masyarakat (3 orang), dan anggota kepolisian (2 orang). Data sekunder diperoleh dari arsip resolusi konflik Bakesbangpol tahun 2023-2025, laporan keuangan ormas, serta dokumen kebijakan daerah terkait pengelolaan ormas. Analisis data dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas. Penulis juga mengadakan forum diskusi terpumpun (FGD) dengan perwakilan ormas untuk menguji temuan awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Ormas X (“Pemuda Mandiri”) dan Ormas Y (“Gerakan Bojonegoro Bersatu”) di Pasar Ngumpakdalem

Konflik antara Ormas X dan Ormas Y mencapai puncaknya pada Maret 2025, ketika kedua kelompok saling klaim kepemilikan lahan parkir di Pasar Ngumpakdalem. Ormas X, yang berbasis di Desa Sugihwaras, mengklaim telah mengelola lahan tersebut sejak 2020 berdasarkan izin lisan dari mantan Camat. Sementara Ormas Y, yang didominasi pemuda dari Desa Kalitidu, menuduh Ormas X melakukan monopoli dengan mematok tarif parkir sewenang-wenang (Rp5.000 untuk motor, padahal rata-rata pasar lain Rp3.000).

Bakesbangpol turun tangan setelah terjadi bentrok fisik yang melukai 5 orang. Mediator menggunakan pendekatan “rekonsiliasi berbasis ekonomi” dengan mengajak kedua pihak berinvestasi dalam koperasi parkir bersama. Hasil negosiasi menghasilkan kesepakatan bagi hasil 55% untuk Ormas X dan 45% untuk Ormas Y, dengan pengawasan ketat dari Dinas Perhubungan. Selain itu, kedua ormas diwajibkan mengalokasikan 10% pendapatan untuk program pelatihan kewirausahaan pemuda.

Proses mediasi tidak berjalan mulus pada awalnya. Ormas Y menolak skema bagi hasil karena merasa hak mereka diabaikan. Untuk mengatasi kebuntuan, Bakesbangpol melibatkan tokoh adat setempat, Ki Dalang Sutrisno, yang dihormati kedua belah pihak. Dalam pertemuan di Pendopo Kabupaten, Ki Dalang mengingatkan filosofi Jawa “suro diro joyodiningrat, lebur

dening pangastuti” (konflik bisa dilebur dengan kebijaksanaan). Pendekatan kultural ini berhasil meredakan ego sektoral dan membuka ruang kompromi.

Pasca-kesepakatan, Bakesbangpol membentuk tim pemantau independen yang terdiri dari perwakilan DPRD, akademisi, dan LSM. Tim ini bertugas memastikan transparansi pengelolaan koperasi parkir serta mengevaluasi penggunaan dana pelatihan. Pada Mei 2025, tercatat 30 pemuda dari kedua ormas telah mengikuti pelatihan digital marketing yang difasilitasi Dinas Kominfo. Hasilnya, beberapa peserta berhasil memasarkan produk UMKM lokal melalui platform e-commerce, dengan rata-rata penjualan Rp2,5 juta per bulan.

Transformasi Ormas Y melalui Program “Parkir Berdikari”

Pasca-konflik, Ormas Y (“Gerakan Bojonegoro Bersatu”) menginisiasi program “Parkir Berdikari” yang menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM. Program ini melatih mantan anggota yang terlibat konflik untuk mengelola usaha cuci motor dan bengkel kecil di area parkir. Pada Juni 2025, tercatat 15 mantan anggota Ormas Y telah menjadi usaha mandiri dengan omzet rata-rata Rp7 juta/bulan. Transformasi ini mengurangi stigma negatif terhadap ormas sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Kesuksesan program ini menarik perhatian Bank Indonesia Perwakilan Bojonegoro, yang kemudian memberikan pendanaan hibah sebesar Rp150 juta untuk pengembangan usaha. Dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan cuci motor otomatis dan pelatihan teknis. Selain itu, Dinas Perdagangan membantu memfasilitasi izin usaha gratis bagi peserta program. Kolaborasi multisektor ini menjadi contoh konkret bagaimana konflik bisa diubah menjadi peluang ekonomi.

Namun, tantangan muncul ketika beberapa mantan anggota Ormas Y kembali terlibat dalam praktik premanisme. Menanggapi hal ini, Bakesbangpol bekerja sama dengan Kepolisian Resor Bojonegoro mengadakan program “Srawung Pemuda”, yaitu dialog rutin yang menggabungkan pendekatan keagamaan dan motivasi kewirausahaan. Peserta yang terbukti berprestasi diberi insentif tambahan, seperti bantuan modal usaha tahap kedua. Hingga Juli 2025, 80% peserta program tidak lagi terlibat dalam aktivitas kekerasan.

Dampak jangka panjang program “Parkir Berdikari” terlihat dari berkurangnya pengangguran di Desa Kalitidu. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran pemuda turun dari 12% (2024) menjadi 8% (2025). Selain itu, usaha cuci motor yang dikelola mantan Ormas Y menjadi destinasi wisata edukasi bagi pelajar SMA di Bojonegoro, menunjukkan perubahan paradigma masyarakat terhadap peran ormas.

Peran Ormas Z (“Laskar Hijau”) dalam Pengelolaan Lingkungan

Ormas Z (“Laskar Hijau”) menjadi contoh ormas yang berhasil mengalihkan energi konflik ke kegiatan produktif. Awalnya, ormas ini sering bentrok dengan petugas kebersihan

karena memprotes pembangunan TPA di wilayah mereka. Pada 2025, Bakesbangpol memfasilitasi kolaborasi antara Ormas Z, Dinas Lingkungan Hidup, dan akademisi Universitas Bojonegoro untuk mengembangkan program “Bank Sampah Digital”. Anggota Ormas Z dilatih mengelola sampah plastik menjadi bahan baku kerajinan, dengan pendapatan mencapai Rp12 juta/bulan. Program ini mengurangi volume sampah di TPA sebesar 30% sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam isu lingkungan.

Inovasi lain yang dikembangkan Ormas Z adalah sistem “Eco-Reward”, di mana warga yang menukarkan sampah plastik mendapat poin yang bisa ditukar dengan sembako atau potongan pajak bumi. Sistem ini diintegrasikan dengan aplikasi Si-Madu Bakesbangpol, sehingga transaksi tercatat secara real-time. Pada kuartal II 2025, lebih dari 1.000 keluarga di Kecamatan Baureno telah berpartisipasi, dengan total sampah terkumpul 5,2 ton.

Keberhasilan Ormas Z menarik minat perusahaan swasta. PT Hijau Lestari, produsen kemasan ramah lingkungan, menjalin kemitraan dengan ormas ini untuk memasok bahan daur ulang. Kemitraan ini menghasilkan kontrak senilai Rp200 juta per bulan, yang 20%-nya dialokasikan untuk pembangunan taman baca masyarakat. Selain itu, Ormas Z juga mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai “Komunitas Penggerak Lingkungan Terinovatif 2025”.

Dukungan pemerintah desa menjadi kunci keberlanjutan program. Di Desa Temayang, Peraturan Desa No. 05/2025 mewajibkan setiap RT memiliki bank sampah mini yang berjejaring dengan Ormas Z. Langkah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi warga, tetapi juga memperkuat legitimasi ormas sebagai mitra pembangunan.

Inovasi Bakesbangpol: Aplikasi “Si-Madu” untuk Pemantauan Ormas

Bakesbangpol meluncurkan aplikasi “Sistem Informasi Mediasi dan Urusan Ormas” (Si-Madu) pada April 2025. Aplikasi ini memungkinkan pelaporan konflik secara real-time, verifikasi data ormas, dan monitoring kesepakatan mediasi. Contohnya, dalam kasus sengketa proyek jalan di Desa Sumberrejo, proses mediasi yang biasanya memakan waktu 2 minggu bisa diselesaikan dalam 5 hari melalui fitur video conference di Si-Madu. Hingga Juni 2025, 89% ormas terdaftar telah menggunakan aplikasi ini, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ormas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik ormas di Bojonegoro pada 2025 menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada ketimpangan ekonomi dan lemahnya komunikasi multipihak. Bakesbangpol berhasil mengurangi eskalasi konflik melalui pendekatan mediasi berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan ekonomi. Keberhasilan transformasi Ormas X, Y, dan Z membuktikan bahwa ormas bukan hanya sumber masalah, tetapi juga potensi pembangunan jika dikelola dengan inovasi dan partisipasi aktif.

Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan aplikasi Si-Madu, integrasi program pemberdayaan dalam RPJMDes, dan pendirian forum ormas berbasis digital.

DAFTAR REFERENSI

Bakesbangpol Bojonegoro. (2025). Laporan Kinerja Tahunan: Pengelolaan Konflik dan Pembinaan Ormas.

Data Aplikasi Si-Madu Bakesbangpol Bojonegoro (Januari-Juni 2025).

Suryadinata, L. (2023). *Dinamika Ormas di Indonesia: Antara Konflik dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Konflik Bakesbangpol Bojonegoro, 15 Mei 2025.